

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

No	Komoditas	Rata-Rata Januari	Rata- Rata Februari	Rata-Rata Maret
1	Beras Premium	Rp 16.225	Rp 16.225	Rp 16.225
2	Beras Medium	Rp 13.725	Rp 13.725	Rp 13.725
3	Beras Medium Non SPHP	Rp 14.083	Rp 14.083	Rp 14.083
4	Jagung Tk Peternak	Rp 9.286	Rp 9.286	Rp 9.286
5	Bawang Merah	Rp 45.750	Rp 45.750	Rp 45.750
6	Bawang Putih Bonggol	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 45.500
7	Cabai Merah Keriting	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 45.500
8	Cabe Merah Besar	Rp 45.500	Rp 45.500	Rp 45.500
9	Daging Ayam Ras	Rp 37.450	Rp 37.450	Rp 37.450
10	Telur Ayam Ras	Rp 32.800	Rp 32.800	Rp 32.800
11	Gula Pasir Konsumsi	Rp 20.762	Rp 20.762	Rp 20.762
12	Minyak Goreng Kemasan	Rp 23.000	Rp 23.000	Rp 23.000
13	Minyak Goreng Curah	Rp 21.000	Rp 21.000	Rp 21.000
14	Tepung Terigu Curah	Rp 11.262	Rp 11.262	Rp 11.262
15	Tepung Terigu Kemasan	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
16	Ikan Kembung	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 40.000
17	Ikan Tongkol	Rp 33.250	Rp 33.250	Rp 33.250
18	Garam Halus Beryodium	Rp 16.250	Rp 16.250	Rp 16.250
19	Cabe Rawit Hijau	Rp 57.750	Rp 57.750	Rp 57.750

Berdasarkan data rata-rata harga bulan Januari-Maret, seluruh komoditas strategis di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan harga yang tidak mengalami perubahan (stabil) selama tiga bulan berturut-turut. Komoditas utama seperti beras premium, beras medium, bawang

merah, bawang putih, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, ikan, serta garam mempertahankan harga pada level yang sama sepanjang periode pengamatan. Stabilitas harga ini mengindikasikan bahwa pasokan barang kebutuhan pokok masih mencukupi dan distribusi komoditas di wilayah Kabupaten Nias Selatan berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. Selain kelompok bahan pangan, komoditas lain yang menjadi kebutuhan masyarakat juga menunjukkan kondisi yang stabil. Harga minyak goreng kemasan tetap sebesar Rp23.000/liter, minyak goreng curah Rp21.000/liter, tepung terigu kemasan Rp15.000/kg, serta garam halus beryodium Rp16.250/kg. Demikian pula pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras tetap Rp37.450/kg, telur ayam ras Rp32.800/kg, ikan kembung Rp40.000/kg, dan ikan tongkol Rp33.250/kg. Kondisi ini mencerminkan belum adanya tekanan biaya maupun lonjakan permintaan yang signifikan selama triwulan pertama, sehingga daya beli masyarakat relatif terjaga dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan dalam kondisi harga yang lebih pasti. Meskipun demikian, terdapat beberapa risiko inflasi ke depan yang perlu diantisipasi. Komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit hijau (Rp57.750/kg), cabai merah, bawang merah, dan bawang putih tetap memiliki potensi menjadi penyumbang inflasi apabila terjadi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, serangan hama, maupun hambatan distribusi dari daerah pemasok. Selain itu, Kabupaten Nias Selatan yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah juga rentan terhadap kenaikan biaya transportasi, fluktuasi harga BBM, serta gangguan logistik akibat kondisi cuaca laut. Oleh karena itu, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga secara berkala, pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah apabila diperlukan, serta menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan stok pangan menjadi langkah penting untuk mempertahankan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi pada periode mendatang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis pada triwulan I, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Nias Selatan relatif stabil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di daerah. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah, terutama beras, bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan minyak goreng. Kondisi ini menyebabkan harga komoditas sangat dipengaruhi oleh perubahan harga di daerah pemasok, biaya distribusi, serta kelancaran transportasi laut yang menjadi jalur utama pengiriman barang ke Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, keterbatasan produksi pangan lokal, khususnya komoditas hortikultura dan beberapa bahan pangan strategis, menyebabkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masih rendah. Produksi yang bersifat musiman juga mengakibatkan pasokan tidak selalu tersedia secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu kenaikan harga pada periode tertentu, terutama saat cuaca ekstrem atau terjadi gangguan produksi akibat hama dan penyakit tanaman. Kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan sebagai wilayah kepulauan turut meningkatkan biaya logistik dan memperbesar risiko keterlambatan distribusi barang. Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya kapasitas penyimpanan (buffer stock) dan belum optimalnya sistem distribusi pangan antarkecamatan, sehingga ketika terjadi peningkatan permintaan pada hari besar keagamaan atau kondisi tertentu, ketersediaan pasokan di beberapa wilayah dapat terganggu. Di sisi lain, koordinasi dalam penyediaan data harga dan stok pangan secara real time masih perlu diperkuat agar langkah antisipatif dapat dilakukan lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah

Daerah, TPID, Bulog, Bank Indonesia, instansi vertikal, pelaku usaha, dan kelompok tani dalam meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat distribusi, menjaga ketersediaan stok, serta melaksanakan pemantauan harga dan intervensi pasar secara tepat waktu guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Nias Selatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi yang berfokus pada aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui inspeksi pasar (sidak pasar), Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Gerakan Menanam sebagai upaya penguatan produksi pangan lokal. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan Sidak Pasar pada tanggal 13 Februari 2026 di Pasar Jepang dan distributor bahan pokok di Kecamatan Teluk Dalam sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kegiatan ini melibatkan unsur Polres Nias Selatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta Bagian Perekonomian Kabupaten Nias Selatan. Sidak dilakukan melalui pemantauan harga berbagai bahan pokok, pemeriksaan ketersediaan stok dan distribusi barang, serta dialog dengan pedagang dan distributor terkait kendala pasokan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pokok secara umum dalam kondisi aman, harga relatif stabil, serta tidak ditemukan indikasi penimbunan barang. Sebagai tindak lanjut, TPID akan terus melakukan pemantauan secara berkala, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memberikan imbauan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kenaikan harga yang tidak wajar.

Selain pengawasan pasar, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bentuk intervensi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Pelaksanaan GPM didorong oleh hasil pemantauan SP2KP Kementerian Perdagangan yang menunjukkan Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan harga pada minggu ketiga dan keempat Januari 2026, dengan komoditas penyumbang utama berupa daging ayam ras, bawang merah, dan beras. Menindaklanjuti kondisi tersebut, GPM dilaksanakan sebanyak lima kali, yaitu di Lapangan Orurusa Teluk Dalam (13 Februari 2026), Kantor Camat Gomo (17 Februari 2026), Kantor Camat Siduaori (24 Februari 2026), Kantor Camat Lahusa (28 Februari 2026), dan Kantor Camat Onohazumba (7 Maret 2026). Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh akses terhadap komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau, antara lain beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp62.000, minyak goreng Rp15.700/kg, dan gula pasir Rp19.000/kg. Pelaksanaan GPM ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam potensi kenaikan harga komoditas strategis di pasar. Sebagai upaya pengendalian inflasi dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga melaksanakan Gerakan Menanam pada tanggal 25 Februari 2026 di Desa Hilianaa, Kecamatan Teluk Dalam. Kegiatan ini difokuskan pada penanaman 6.000 batang cabai merah, salah satu komoditas yang sering memberikan andil terhadap inflasi daerah akibat fluktuasi pasokan dan harga. Gerakan Menanam bertujuan meningkatkan produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai di tingkat lokal sehingga dapat mengurangi risiko gejolak harga pada

periode mendatang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Nias Selatan selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, TPID, aparat penegak hukum, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek melalui pengawasan pasar dan intervensi harga, tetapi juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal. Kombinasi kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan bahan pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung terciptanya inflasi daerah yang tetap terkendali.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi selama Triwulan I Tahun 2026, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga pangan. Hal ini tercermin dari perkembangan harga berbagai komoditas strategis yang relatif stabil selama periode Januari hingga Maret 2026, tanpa adanya lonjakan harga yang signifikan pada komoditas utama seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilakukan mampu menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sidak pasar terbukti efektif sebagai instrumen pemantauan harga dan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa stok pangan di tingkat distributor dan pedagang berada dalam kondisi cukup, harga tetap terkendali, serta tidak ditemukan praktik penimbunan yang berpotensi memicu kenaikan harga. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan aparat penegak hukum sehingga respons terhadap potensi gangguan stabilitas harga dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

Kebijakan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga memberikan kontribusi positif dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, terutama pada saat terdapat indikasi kenaikan harga berdasarkan hasil pemantauan SP2KP Kementerian Perdagangan. Pelaksanaan GPM di lima lokasi berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap komoditas pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, kegiatan ini juga berperan sebagai instrumen stabilisasi harga melalui peningkatan pasokan komoditas strategis di wilayah yang menjadi sasaran kegiatan. Sementara itu, pelaksanaan Gerakan Menanam merupakan langkah yang tepat dalam mendukung pengendalian inflasi dari sisi hulu. Penanaman cabai merah di Desa Hilianaa menjadi upaya awal untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Namun demikian, dampak kegiatan ini terhadap stabilitas harga masih memerlukan waktu karena hasil produksi baru akan dirasakan pada periode panen berikutnya. Oleh karena itu, program ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya pada komoditas pangan strategis lainnya agar memberikan manfaat yang lebih optimal terhadap pengendalian inflasi daerah.

Meskipun hasil pelaksanaan kebijakan menunjukkan capaian yang baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Kabupaten Nias Selatan masih memiliki tingkat

ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi akibat kondisi cuaca, transportasi laut, maupun kenaikan biaya logistik. Selain itu, kapasitas produksi pangan lokal dan cadangan pangan daerah masih perlu diperkuat untuk mengurangi risiko gejolak harga pada saat permintaan meningkat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan periode tertentu lainnya. Ke depan, efektivitas pengendalian inflasi perlu didukung melalui penguatan koordinasi TPID, peningkatan pemantauan harga dan stok pangan secara real time, perluasan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, pengembangan produksi pangan lokal melalui Gerakan Menanam, serta peningkatan kerja sama antardaerah untuk menjamin kelancaran pasokan komoditas strategis. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas harga dan tingkat inflasi di Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan harga komoditas strategis dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui pendekatan yang terintegrasi dengan mengoptimalkan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar setiap potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini melalui pemantauan harga dan stok pangan secara berkala, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan periode meningkatnya permintaan masyarakat. Pada aspek keterjangkauan harga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu dilaksanakan secara lebih rutin dan diperluas jangkauannya hingga kecamatan-kecamatan yang memiliki akses distribusi terbatas. Pelaksanaan operasi pasar bersama Bulog dan distributor pangan juga perlu terus diperkuat, khususnya untuk komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai, dan daging ayam ras. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi potensi kenaikan harga yang tidak wajar. Dari sisi ketersediaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui perluasan program Gerakan Menanam, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pemberdayaan kelompok tani dan kelompok wanita tani. Program tersebut perlu difokuskan pada komoditas hortikultura yang sering mengalami fluktuasi harga, seperti cabai dan bawang, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Selain itu, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah serta optimalisasi peran Bulog dalam menjaga stok pangan strategis juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin ketersediaan pasokan pada saat terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Pada aspek kelancaran distribusi, diperlukan penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dengan daerah sentra produksi guna menjamin kontinuitas pasokan komoditas strategis. Mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut, koordinasi dengan pemerintah provinsi, operator transportasi, dan pelaku usaha logistik perlu ditingkatkan untuk meminimalkan hambatan distribusi dan menekan biaya angkut yang berpotensi meningkatkan harga barang di tingkat konsumen. Di samping itu, pemantauan distribusi dan stok barang secara berkala perlu terus dilakukan melalui kegiatan sidak pasar dan koordinasi lintas instansi. Selanjutnya, pada aspek komunikasi efektif, TPID perlu terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak, pemanfaatan pangan lokal, dan pentingnya menjaga stabilitas harga melalui berbagai media komunikasi.

Publikasi perkembangan harga, stok pangan, serta langkah-langkah pengendalian inflasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk membangun optimisme masyarakat dan mencegah kepanikan yang dapat memicu pembelian berlebihan (*panic buying*). Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Nias Selatan dapat terus terjaga sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.